

## **Dekontruksi Narasi *Toleransi, Intoleransi, dan Radikalisme* dalam Buku Ajar PPKN Kelas XII Kurikulum Merdeka**

**Qoriatul Mahfudloh**

Universitas Al-Qolam Malang

[qori@alqolam.ac.id](mailto:qori@alqolam.ac.id)

### **ABSTRACT**

This study aims to deconstruct the narration of tolerance, intolerance, and radicalism in handbook PkN for grade XII Kurikulum Merdeka. This study employs critical discourse analysis from Teun A. van Dijk and deconstruction theoretical framework. The findings reveal three main theses. First, the textbook constructs "tolerance" as procedural compliance with the state's definition, rather than as substantive dialogue open to ambiguity and irreconcilable differences. Second, the narratives of intolerance and radicalism are built upon hierarchical binary oppositions (Pancasila versus other ideologies; tolerant versus intolerant; nationalism versus radicalism) that oversimplify historical and political complexities while simultaneously suppressing the trace of controversial cases implicating the state as an agent of intolerance. Third, the textbook contains significant internal contradictions, including "repressive tolerance" (the state enforces tolerance through threats of symbolic and legal violence) as well as a gap between the acknowledgment of structural discrimination and the absence of critique regarding the state's role in reproducing exclusion. This research contributes to the enrichment of critical curriculum studies in the Indonesian context, specifically in illuminating how the state, through curriculum and textbooks, shapes official discourse on the boundaries of tolerance while simultaneously foreclosing the possibility of honest public deliberation about democracy's internal contradictions. Its pedagogical implications underscore the need to develop critical reading skills for both teachers and students, along with policy recommendations for textbooks to open spaces for discussing the ethical dilemmas of tolerance rather than merely presenting ready-made values.

**Keywords:** *deconstruction; tolerance; intolerance; radicalism; civics curriculum; critical discourse analysis*

### **INTISARI**

Penelitian ini bertujuan untuk mendekonstruksi narasi "toleransi", "intoleransi", dan "radikalisme" dalam buku ajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKn) Kelas XII Kurikulum Merdeka. Riset ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain Critical Discourse Analysis (CDA) dari Teun A. van Dijk dan dekonstruksi Jacques Derrida sebagai kerangka analisis utama. Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama. Pertama, buku ajar mengonstruksi "toleransi" sebagai kepatuhan prosedural terhadap definisi negara, bukan sebagai dialog substantif yang

terbuka terhadap ambiguitas dan perbedaan yang tidak dapat direkonsiliasi. Kedua, narasi intoleransi dan radikalisme dibangun melalui oposisi biner hierarkis (Pancasila vs ideologi lain; toleran vs intoleran; nasionalisme vs radikalisme) yang menyederhanakan kompleksitas historis dan politis, sekaligus menekan jejak (*trace*) berupa kasus-kasus kontroversial yang melibatkan negara sebagai aktor intoleransi. Ketiga, buku ajar mengandung kontradiksi internal yang signifikan, antara lain "toleransi yang represif" (negara menegakkan toleransi melalui ancaman kekerasan simbolik dan hukum) serta kesenjangan antara pengakuan atas diskriminasi struktural dan ketiadaan kritik terhadap peran negara dalam mereproduksi eksklusivitas. Penelitian ini berkontribusi pada pengayaan *critical curriculum studies* di konteks Indonesia, khususnya dalam memahami bagaimana negara, melalui kurikulum dan buku ajar, membentuk wacana resmi tentang batas-batas toleransi sekaligus menutup kemungkinan diskusi publik yang jujur tentang kontradiksi internal demokrasi. Implikasi pedagogisnya mendorong perlunya pengembangan *critical reading skills* bagi guru dan siswa, serta rekomendasi kebijakan agar buku ajar membuka ruang untuk diskusi dilema etis toleransi daripada sekadar menyajikan nilai jadi.

**Kata kunci:** *dekonstruksi; toleransi; intoleransi; radikalisme; buku ajar PkN; analisis wacana kritis.*

## PENDAHULUAN

Dalam 5 (lima) tahun terakhir data dari berbagai lembaga riset tentang kondisi intoleransi di Indonesia menunjukkan gambaran yang kompleks dan kadang kontradiktif. Meski demikian, data riset-riset tersebut menunjukkan bahwa tingkat intoleransi dan pemahaman tentang radikalisme merupakan tantangan serius dan majemuk. Survei yang dilakukan INFID menunjukkan bahwa 42,5 % pemuda Indonesia memiliki pandangan yang cenderung intoleran terhadap kelompok minoritas (INFID, 2025). Sedangkan Kemenag menggambarkan sebaliknya, indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) menunjukkan skor 76,47 pada tahun 2024 dan naik secara konsisten sebesar 67,46% sejak tahun 2020 (Kemenag, 2024a, 2025). Sedangkan data pendukung Setara Institute mencatat setidaknya ada 217 kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan yang dilaporkan pada tahun 2023 meski menurut sejumlah survei terdapat peningkatan tingkat toleransi (INFID, 2025).

Laporan-laporan di atas sebenarnya menunjukkan parameter pengukuran yang berbeda antar lembaga. Salah satunya adalah subjek dengan kelompok usia tertentu. Litbang Kompas menemukan bahwa usia di bawah 40 tahun justru memiliki nilai toleransi yang tinggi dibandingkan kelompok di atas 40 tahun (Kompas, 2022). Temuan ini menunjukkan bahwa intoleransi di kalangan muda bisa sangat spesifik pada isu-isu tertentu, bukan pada semua aspek kehidupan.

Sejak tiga dekade ini negara secara bersamaan mendorong moderasi beragama. Pembaruan gagasan moderasi beragama mulai diterapkan sejak tahun 2018, Menteri Agama menetapkan tahun 2019 sebagai tahun moderasi beragama dan penguatannya dimulai hingga saat ini (Kemenag, 2019a). Konsep-konsep moderasi beragama untuk menteralisir radikalisme dan mengukuhkan toleransi diterapkan dengan empat pijakan utama, yakni komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan akomodatif terhadap budaya lokal (Kemenag, 2024b, 2019b; Muhammadiyah, 2022). Pendorongan moderasi beragama tersebut harus berjalan secara integral pula dengan

apparatus negara. Sayangnya, melihat bagaimana kebebasan berekspresi dan bersikap kritis justru diproblematikasikan oleh pemerintah belakangan ini jelas maksudnya bahwa apparatus negara dan hukum mengendalikan definisi tindakan, keyakinan, dan ekspresi sebagai *menyimpang* dari norma resmi. Makna toleransi, intoleransi, dan radikalisme yang mungkin muncul di dalam buku-buku ajar juga perlu kembali *dipertimbangkan* maknanya mengingat beberapa definisi justru dipolitisasi.

Sikap intoleransi dan radikalisme yang naik turun bahkan melonjak di 5 (lima) tahun belakangan ini menandakan bahwa akar masalahnya bukan lagi soal ideologi ekstrem, tetapi lebih pada kultur dalam sistem sosial masyarakat Indonesia yang terasa *keurang aman* bagi perbedaan (Sopian et al., 2021). Walaupun serangan terror dalam skala besar telah banyak berkurang namun dampak dari ancamannya tidak pernah benar-benar hilang. Masih ada terror-terror kecil yang tumbuh tanpa kita sadari di dalam nadi sosial masyarakat (Rasyid, 2025).

Buku ajar PkN, yang dikembangkan melalui gerakan Kurikulum Merdeka, semestinya menjadi instrumen negara dalam menanamkan ideologi dan nilai-nilai kebangsaan tanpa bias. Akan tetapi, sejauh ini kajian tentang toleransi dan radikalisme dalam buku teks pendidikan di Indonesia didominasi oleh pendekatan *content analysis* yang sifatnya deskriptif normatif. Misalnya, nilai toleransi apa saja yang ada di dalam teks serta bagaimana menerapkannya di kelas tanpa melakukan kritik terhadap struktur wacana itu sendiri (Fusnika et al., 2023; Yuliana et al., 2024). Demikian pula tentang kategorisasi bentuk pembelajaran toleransi dalam buku Bahasa Indonesia Kurikulum Merdeka ke dalam empat aktivitas; menggambar, berdiskusi, menulis, dan membaca dongeng, namun pendekatan yang digunakan masih bersifat kategori tematik (Ngulya & Sukardi, 2024). Beberapa penelitian yang bertujuan untuk membuktikan bahwa buku teks secara sistematis telah mengintegrasikan nilai-nilai moderasi beragama diperkuat oleh temuan tentang efektivitas pendekatan wacana ini ke dalam narasi-narasi sejarah dan teks kebahasaan (Harsaid et al., 2024; Yasi et al., 2018). Penelitian-penelitian tersebut menegaskan bahwa Kurikulum Merdeka memang memberikan akses pada anak didik pada akses buku yang memuat nilai-nilai moderasi beragama, namun kajian yang lebih kritis justru diperlukan agar semangat untuk membongkar bias dalam bahasa semakin meningkat.

Di balik upaya konstruksi nilai positif tersebut, sejumlah studi menemukan adanya kontradiksi, bias, atau bahkan muatan intoleransi yang disamarkan. Seperti penelitian Amrullah & Rida dan Israwati Amir, dkk memang sudah mulai menggunakan analisis wacana kritis untuk mengungkap muatan intoleransi (Amir et al., 2026; Amrullah & Rida, 2021). Selain itu tesis lain secara teoretik memperingatkan bahwa buku teks berfungsi sebagai hegemoni negara untuk *memenangkan* pandangan dunia tertentu sambil mereduksi perspektif alternatif. Riset Widyawati (2025) menjelaskan bagaimana isu-isu kontroversial dikemas dalam nilai-nilai tunggal dan kaku, yang semestinya menjadi ruang dialog kritis Bersama masyarakat (Widyawati, 2025).

Paradoks-paradoks inilah yang menjadi celah utama di mana sebagian besar penelitian hanya fokus pada perspektif normatif. Berbeda dengan riset-riset tersebut, penelitian ini berupaya untuk membongkar oposisi biner yang menjadi fondasi wacana buku ajar. Dengan demikian penelitian ini memulai perjalanannya dengan mengajukan pertanyaan fundamental perihal bagaimana struktur makna dikonstruksi dan hierarki kuasa apa yang dipertahankan melalui wacana toleransi/radikalisme dalam buku ajar PkN.

Penelitian ini memiliki tujuan betapa pentingnya untuk membaca kembali secara kritis perihal narasi yang *diressmikan* tentang apa yang disebut *intoleran* dan *radikal*. Sejauh observasi yang dilakukan kesenjangan penelitian yang dapat diajukan adalah belum memadainya kajian yang secara spesifik menggunakan kerangka teori Derrida untuk membedah oposisi biner dalam wacana toleransi-radikalisme di buku ajar Kurikulum Merdeka. Oleh sebab itu, artikel ini berupaya untuk mengidentifikasi oposisi biner yang dibangun di dalam teks PkN Kurikulum Merdeka Kelas XII, menganalisis kontradiksi internal dalam wacana toleransi, dan menemukan ruang negosiasi dan pembacaan alternative terhadap tiga wacana tersebut.

Penelitian ini menggunakan kerangka konseptual Jacques Derrida yang dikenal dengan *différance* di mana makna selalu bersifat tertunda. Dengan pendekatan *différance* ini jejak pihak dan agen yang dimarginalkan dapat terlacak. Konsep sentral ini sengaja menggunakan ejaan *a* (bukan *e* seperti dalam kata *difference*) untuk menunjukkan dua gerakan sekaligus: *to differ* atau membedakan dan *to defer* untuk mengesampingkan atau menunda. Derrida menjelaskan bahwa makna dalam sebuah teks tidak pernah hadir secara utuh. Ia selalu merupakan hasil dari perbedaan dari hal lain yang selalu tertunda, tidak pernah selesai. Karena Derrida dianggap sebagai filsuf yang mengkritik logosentrisme, maka konsep *différance* ini merupakan konsep kunci dalam gagasan dekonstruksi (Siregar, 2019).

Derrida menjelaskan pada para kritikusnya tentang dekonstruksi (Derrida, 1982): *to deconstruct a text is to expose the inevitable and ineliminable contradictions and oppositions upon which it is founded, which it disguises and refuses to acknowledge, to expose it as devoid of fixed and determinate meaning, as irreducibly complex, unstable, and even impossible*. Bahwa dekonstruksi tidak sama dengan menghancurkan makna dan wacana, ia lebih pada membongkar untuk memahami. Derrida menggunakan analogi mesin yang dibongkar untuk memahami cara kerja mesin, membuka kemungkinan perbaikan, dan merakitnya kembali dengan cara yang berbeda. Analogi ini ditegaskan karena di sisi lain Derrida juga menghormati sejumlah tradisi (Derrida, 1976, 1978, 1981).

Konsep Derrida digunakan dalam kajian ini karena memiliki sejumlah kelebihan lain selain yang telah disebutkan. Di antaranya adalah inklusivitas atau perhatian pada teks-teks dan wacana yang dimarginalkan atau dipinggirkan. Dekonstruksi menawarkan aspek ini sebagai jawaban bahwa dekonstruksi juga menjadi langkah politis dan emansipatoris. Selain itu, konsep ini juga relevan untuk diterapkan pada bidang lintas disiplin (Mendie & Udofia, 2020). Salah satu kesalahpahaman paling umum tentang konsep dekonstruksi adalah menganggapnya sinonim dengan *destruksi* atau penghancuran makna teks. Derrida dengan tegas membantah penafsiran ini (Derrida, 1983, pp. 1–5). Ia menolak dianggap sebagai teoretisi berparadigma nihilisme, meskipun ia belum sepenuhnya dapat menjawab kritik yang menganggap bahwa ia berhasil *membongkar* tetapi belum pandai menunjukkan metode *merakit kembali* (Cisney, 2019; Gunkel, 2020). Satu-satunya hal yang dapat ia jelaskan untuk membantah kegagalan aksiologis ini adalah dengan berpihak secara emansipatoris pada teks-tekd yang dimarginalkan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme dengan metode analisis wacana kritis atau *critical discourse analysis*. Data primer yang digunakan dalam buku Pendidikan Pancasila untuk SMA/MA//SMK/MAK kelas XII tahun 2023. Secara khusus akan membedah bab 2, bab

3, dan bab 4. Sedangkan data sekunder sebagai bahan kajian intertekstualitas peneliti akan menggunakan Peraturan BPIP, dokumen kurikulum merdeka, transkrip resmi tentang intoleransi.

Teknik analisis data akan menggunakan proses integrasi analisis wacana kritis dan dekonstruksi teks. Teknik ini meliputi tahapan yang mencakup analisis wacana kritis van Dijk, dekonstruksi Derrida, dan tahap triangulasi. Pada bagian analisis wacana kritis, data akan didedah pada struktur makro yang meliputi tema global yang ada di bab 2, 3, dan 4. Superstruktur yang mencakup kerangka argument. Struktur mikro yang mencakup semantic, sintaksis, stilistika, dan retorika penggunaan kalimat.

Teori dekonstruksi Derrida akan mendedah dan mengidentifikasi oposisi biner hierarkis dalam teks, melacak jejak konsep yang marginal dan dianggap inferior, mengidentifikasi titik kontradiksi dan ambigu, dan melakukan inversi untuk menunjukkan makna alternative. Triangulasi data dilakukan dengan langkah konfirmabilitas berupa menganalisis jejak yang sistematis dan transparan bersama pakar-pakar kebahasaan.

## HASIL DAN DISKUSI

Kajian ini bertujuan untuk mendedah wacana moderasi beragama dalam buku teks PkN. Khususnya tentang oposisi biner yang bergerak di balik narasi toleransi, intoleransi, dan radikalisme. Pendidikan Pancasila untuk SMA/MA kelas XII merupakan buku pegangan untuk guru dan siswa yang diterbitkan oleh Kemendikbud pada tahun 2023. Buku ajar ini dipilih sebagai teks utama dalam penelitian ini karena diterbitkan secara resmi oleh Kemendikbud yang berbasis pada Kurikulum Merdeka Belajar. Tidak hanya itu, buku pegangan ini juga disusun berdasarkan koordinasi antara Kemendikbudristek dengan BPIP atau Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Rohayani et al., 2023). Karena itulah teks ini memiliki legitimasi institusional yang kuat karena digunakan secara merata oleh institusi Pendidikan di seluruh Indonesia. Di samping itu, buku ini juga secara eksplisit membahas isu toleransi, radikalisme, dan pelanggaran HAM dalam konteks keindonesiaan.

Hasil dan diskusi dalam kajian ini dianalisis menggunakan kerangka konsetual dekonstruksi yang dikembangkan oleh filsuf Perancis, Jacques Derrida. Analisa kritis memungkinkan untuk mengidentifikasi ketidakstabilan makna dan konstruksi hierarkis di balik wacana toleransi dan radikalisme. Dalam hal ini pembahasan akan dibagi menjadi tiga (3) temuan yang meliputi: 1) konstruksi oposisi biner dalam buku ajar PkN, 2) kontradiksi-kontradiksi tentang moderasi beragama dan narasi radikalisme, dan 3) pentingnya membuka kemungkinan untuk pembacaan ulang sebagai ruang negosiasi yang tidak tunggal.

### Identifikasi Oposisi Biner dalam Buku Ajar PkN

*Table 1. Identifikasi Oposisi Biner dalam Teks*

No.	Oposisi Biner	Inferior	Superior	Lokasi dalam teks
1.	Ideologi negara	Komunisme, kapitalisme	Pancasila	Hal. 40-41
2.	Sikap keberagaman	Intoleransi, radikal, persekusi	Toleran	Hal. 61-62, Hal. 98-100

3.	Pandangan dunia	Nasionalisme	Kosmopolitanisme	Hal. 59-60
4.	Prinsip sosial	Gotong royong	Individualisme	Hal. 59
5.	Prinsip ekonomi	Ekonomi Pancasila	Fundamentalisme pasar atau kapitalisme	Hal. 60-61
6.	Hak asasi manusia	HAM versi Pancasila	HAM versi Barat atau individualisme	Hal. 59
7.	Radikalisme	Radikalisme revolusioner (1945)	Radikalisme beragama	Hal. 61

***Oposisi 1: Ideologi Negara (Pancasila vs Komunisme & Kapitalisme (hal. 40-41)):***

Sementara itu, ideologi dunia lain yang berkembang ialah komunisme dan kapitalisme. Komunisme dapat dicirikan dengan: 1) tidak meyakini keberadaan Tuhan, 2) kepemilikan barang menjadi milik Bersama, 3) mengajarkan teori perjuangan kelas, 4) revolusi dilakukan secara terus-menerus, 5) mengutamakan kepentingan negara atau kelompok daripada kepentingan individu. Sementara kapitalisme dapat dicirikan dengan: 1) mementingkan diri sendiri, 2) penjaminan atas hak milik perseorangan, 3) kebebasan penuh kepada individu dalam melakukan aktivitas ekonomi, 4) adanya persaingan bebas, 5) harga sebagai penentu mekanisme pasar.

Dalam teks di atas, Pancasila *sengaja* tidak didefinisikan secara detail karena seolah-olah menjadi narasi yang mutlak dipahami dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Pancasila menjadi narasi superior dan menjadi pusat makna yang *stabil* sementara aksis yang lain menjelaskan wacana inferior. Komunisme dan kapitalisme direduksi dan tidak diberi ruang untuk menjelaskan karakteristik mereka yang sesungguhnya. Ideologi di dalam teks ini seolah-olah terkunci hanya pada 5 ciri-ciri tersebut (eksklusi). Oposisi ini bermasalah karena ideologi Pancasila sebenarnya berubah sepanjang sejarah kepemimpinan Indonesia dari Reformasi, Orde Baru, Orde Lama, hingga masa Demokrasi Terpimpin Soekarno. Batas antar dua oposisi biner juga tidak dijelaskan dan digambarkan lewat peristiwa-peristiwa kontekstual bersejarah Indonesia. Hierarki ini runtuh saat kita menyadari bahwa ideologi Pancasila pada praktiknya sebenarnya menyerap unsur-unsur kapitalisme dan komunisme. Oposisi biner yang terdapat di dalam teks ini menutup kemungkinan dialog serius dengan ideologi alternative. Makna-makna yang dikaitkan dengan komunisme dan kapitalisme dimarginalkan dan dapat menimbulkan narasi eksklusi.

***Oposisi 2: sikap keberagaman (intoleran dan radikal vs. toleran) hal. 62, 98-99***

Intoleransi dapat didefinisikan sebagai keadaan di mana seseorang atau sekelompok masyarakat selalu memaksakan keyakinannya untuk dituruti pihak lain, padahal sesungguhnya pihak lain pun mempunyai hak yang sama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal. 62

Kata radikalisme ini seringkali dikaitkan dengan sikap keberagaman menjadi radikalisme beragama. 1) ajaran yang sangat mengutamakan ketaatan mutlak pada agamanya dan menganggap salah keyakinan yang lain sehingga harus dimusnahkan; 2) Bahwa ajaran-ajaran agama diterima dirinya secara paksa, eksklusif, dan bukan sebagai bentuk pilihan bebas;

3) Ada sifat militansi atau ketangguhan membela yang berlebihan sehingga menutup ruang dialog dengan penganut agama lain. Hal. 61

Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, kebebasan memeluk agama dan beribadat menurut agama masing-masing merupakan hak yang dimiliki oleh seseorang. Mengapa terjadi intoleransi? Pada umumnya konflik beragama timbul karena adanya perselisihan antara umat beragama yang mengedepankan ego masing-masing sehingga terjadi gesekan yang lama-kelamaan membesar dan terjadilah pertikaian... Hal. 98

Persekusi diperjelas definisinya oleh Hilman (2021) sebagai berikut: “apabila seseorang melakukan tindakan tanpa dasar undang-undang sehingga mengancam seseorang dalam berdemokrasi dan mengekspresikan suatu pendapat, terkategori persekusi.”... Konflik di masyarakat salah satu penyebabnya adalah persekusi. Oleh sebab itu patuhi aturan hukum dan menjaga ketertiban dan keteraturan. Hal. 99-100

Analisis *toleran* didefinisikan secara positif sebagai sikap menghargai perbedaan. Intoleran, radikal, dan persekusi didefinisikan secara negative melalui karakteristik-karakteristik ekstrem seperti *memaksakan keyakinan, ketaatan mutlak, militansi berlebihan, dan ancaman*. Yang menarik, teks mengakui bahwa revolusi 1945 bisa disebut *radikal*, tetapi teks juga terburu-buru mengalihkan fokusnya pada radikalisme beragama sebagai ancaman. Hal ini menciptakan ambivalensi makna dan interpretasi yang penting bahwa rupanya radikalisme bisa bermakna positif jika dilakukan oleh pahlawan revolusi (*kita*) tetapi negative jika dilakukan oleh *mereka* para kelompok ekstremis agama.

Toleransi tidak pernah didefinisikan secara mandiri dan eksplisit, tetapi dipahami melalui narasi kontrasnya: *intoleran*. Hierarki yang dibangun adalah: *toleran* sebagai wacana superior dan menunjukkan keindonesiaan vs. *intoleran/radikal/persekusi* yang diwacanakan secara inferior dan ancaman. Oposisi ini berupaya untuk mengabsenkan legitimasi kritik radikal terhadap status quo yang juga menciptakan batasan wacana bahwa *kita yang toleran* dan *mereka yang intoleran/radikal*.

Definisi radikalisme sesungguhnya memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup agama belaka. Lebih dari itu juga mencakup berbagai bentuk kritik terhadap kebijakan negara. Wacana radikalisme yang terjadi di dalam sejarah Indonesia, yang kemudian dalam narasi ini disebut sebagai revolusi 1945, adalah bentuk radikalisme yang juga harus dijelaskan kepada pembaca. Dalam dekonstruksi, ini merupakan jalan buntu logis yang dapat diresolusikan oleh teks. Jika radikalisme baik untuk kemerdekaan, mengapa radikalisme buruk untuk reformasi. Hal ini membuka celah bagi siswa untuk bertanya secara kritis.

### ***Oposisi 3: Nasionalisme vs Kosmopolitanisme (Hal. 59-60)***

Kosmopolitanisme didefinisikan sebagai paham yang menganggap seluruh manusia sebagai warga dunia, mendorong tatanan kehidupan yang seragam, dan cenderung mengecilkkan keberadaan nasionalisme, cinta tanah air, dan nilai-nilai lokalitas. Kosmopolitanisme juga dihadirkan sebagai narasi *pelemahan identitas kebangsaan*. Akan tetapi di halaman yang sama terdapat kutipan Soekarno bahwa “internasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak berakar di dalam buminya nasionalisme. Nasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak hidup dalam taman-sarinya internasionalisme.” Kutipan tersebut menawarkan pandangan dialektik yang

mengejutkan bahwa nasionalisme dan internasionalisme adalah dua paham yang saling menumbuhkan dan membutuhkan untuk mempertegas identitas kebangsaan.

Kutipan Soekarno sebenarnya hendak menggoyahkan hierarki yang terlalu tajam dibangun. Sebab jika nasionalisme membutuhkan internasionalisme atau kosmpolitanisme untuk subut maka sebenarnya nasionalisme tidak dapat berdiri sendiri. Nasionalisme merupakan produk identitas yang tegas karena adanya internasionalisme. Oposisi biner ini runtuh secara dialogis karena yang superior bergantung pada narasi inferior untuk eksistensinya sendiri.

***Oposisi 4: Gotong royong vs. Individualisme (Hal. 59)***

Individualism didefinisikan dengan empat makna yang saling berlawanan dan negative: menganggap manusia secara pribadi perlu diperhatikan, menghendaki kebebasan tanpa batas, mementingkan hak perseorangan di atas kepentingan masyarakat, dan menganggap diri sendiri lebih penting dari orang lain. Buku ajar PkN kemudian mengaitkan individualism dengan isu Hak Asasi Manusia (HAM) Barat: “pemikiran tersebut belum tentu cocok jika diterapkan di Indonesia. Pasalnya, budaya dan norma Indonesia lebih mengutamakan kepentingan bersama ketimbang kepentingan individu seperti yang tercermin dalam budaya gotong royong.” Narasi *gotong royong* kemudian diposisikan secara superior karena diasosiasikan dengan identitas nasional, sedangkan individualism menjadi inferior karena dianggap sebagai ancaman budaya Barat.

Narasi ini hendak mempertegas bahwa Indonesia memiliki *cara sendiri* dalam memaknai dan merumuskan hak asasi manusia, yakni dengan menegaskan bahwa hak bersama jauh lebih penting dibandingkan hak individu. Oposisi ini juga berfungsi untuk menolak kritik internasional terhadap kebijakan HAM Indonesia. Akan tetapi, batas antara kepentingan bersama dan kepentingan individu tidak pernah secara jelas dan gamblang dirumuskan di dalam teks buku ajar.

***Oposisi 5: Ekonomi Pancasila vs. Fundamentalisme Pasar (Hal. 60-61)***

*Table 2. Oposisi biner ekonomi Pancasila vs. fundamentalisme pasar*

<b>Diksi berasosiasi Ekonomi Pancasila</b>	<b>Diksi berasosiasi Fundamentalisme Pasar</b>
Kepentingan ekonomi bersama	Kepentingan ekonomi individual
Prinsip kebersamaan	Kebebasan individu
Budaya gotong royong	individualisme
Peran negara melalui pengaturan ekonomi	Peran negara sesedikit mungkin
Efisiensi berkeadilan	Mekanisme pasar
Keseimbangan kemajuan dan kesatuan	Bertransaksi secara leluasa tanpa campur tangan
Penentuan harga berdasarkan kebutuhan pokok oleh negara	Diserahkan pada pasar
Kesejahteraan sosial	Prinsip pengukur alokasi pemenuhan
Kemandirian nasional	Satu-satunya prinsip pengatur kehidupan
Berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Tidak ada kompromi

Diksi dan wacana tentang ekonomi Pancasila yang disandingkan secara berlawanan dengan fundamentalisme pasar dalam buku ajar PkN di atas, bila dianalisa melalui perspektif Derrida,

sebenarnya tidak mencapai makna yang final. Dua wacana di atas tampak paradoks meski diletakkan dalam posisi superior vs. inferior. Representasi ekonomi Pancasila seolah-olah mengangungkan kemandirian ekonomi local-nasional dan menolak konsep pasar global, padahal realitanya negara tetap membutuhkan jejaring pasar global dan investasi internasional (yang notabene berkarakter individualis). Makna-makna yang direpresentasikan oleh fundamentalisme pasar justru tampak lebih kerap hadir di dalam jantung ekonomi nasional kita selama ini. Dengan kata lain, identitas ekonomi Pancasila justru lebih banyak hadir melalui representasi yang disajikan oleh fundamentalisme pasar.

Konsep *efisiensi* dalam bidang ekonomi tidak pernah hadir melalui ruang hampa. Kehadirannya justru lebih tegas karena ada logika harga pasar. Bahkan, bila memang ekonomi Pancasila memberlakukan kepentingan bersama sebagai nyawa atau ruh perekonomiannya, maka tanpa kebebasan individual ruh tersebut sulit untuk diimplementasikan. Dengan demikian superioritas ekonomi Pancasila yang disajikan justru memperoleh makna utamanya dari kutub inferior yang sedang berusaha dimarginalkan oleh teks.

Analisis ini sebenarnya hendak meruntuhkan pernyataannya sendiri lewat sejumlah paradoks-paradoks logis. Pada teks di atas, ekonomi Pancasila dianggap sebagai kebenaran tunggal dan absolut. Padahal realita menunjukkan sebaliknya. Dekonstruksi menunjukkan bahwa ekonomi Pancasila dan fundamentalisme pasar bukanlah dua entitas wacana yang layak untuk diperlawankan, dipisah, maupun diberi label superior/inferior. Karena kedua wacana tersebut justru membuka dialog interaktif yang dapat mendorong gerakan ekonomi yang mandiri dan tetap kuat dalam identitas.

### ***Oposisi 6: HAM Pancasila vs. HAM Barat (Hal. 59)***

Wacana tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang ditarik ke dalam pertarungan wacana antara nilai domestik vs. eksternal terdapat pada bab ber-Pancasila dalam kehidupan global, terutama pada halaman 59. Teks yang terdapat di halaman ini secara tersurat dan tersirat memperlawankan tentang penegakan HAM dalam perspektif keindonesiaan dengan sistem individualism yang datang dari kultur Barat.

HAM Barat direpresentasikan sebagai agenda terselubung individualism. Teks literal menyatakan bahwa:

Individualism ini seringkali menjadi agenda terselubung bagi isu HAM. Nilai-nilai HAM yang datang dari negara-negara Barat berasal dari pemikiran yang menempatkan manusia sebagai subjek individu yang bebas (individualisme). Pemikiran tersebut belum tentu cocok diterapkan di Indonesia. Pasalnya, budaya dan norma Indonesia lebih mengutamakan kepentingan bersama ketimbang kepentingan individu, seperti tercermin dalam budaya gotong royong.

Dengan menguatnya individu, hal-hal yang menjadi kepentingan umum seringkali terganggu. Tidak sedikit orang melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang mengganggu kepentingan umum dengan mengatasnamakan HAM. Di saat bersamaan, negara tampak terlihat melemah. Negara seringkali tampak tidak berani menindak perbuatan-perbuatan

individu yang mengganggu ketertiban umum karena khawatir mendapat protes dan tudingan sebagai pelanggaran HAM, baik dalam maupun luar negeri. (Bab 2 Hal.9)

Dalam narasi di atas, HAM versi Pancasila diperlawankan dengan HAM bersi Barat yang cenderung individualisme. Konsep individualisme ini direpresentasikan sebagai *perbuatan tertentu yang mengganggu ketertiban umum* dan bentuk tersirat dari pelemahan negara. Padahal pada praktiknya, hak-hak bersama tidak dapat tegak tanpa kuatnya validasi terhadap hak individu yang dianggap merupakan kultur Barat tersebut. Pada oposisi sebelumnya, bahkan ditegaskan bahwa individualism yang ditegaskan justru akan menggiring pada tegaknya hak-hak bersama. Polarisasi wacana yang terlampau kaku semacam ini justru melemahkan kekuatan untuk menegakkan hak-hak bersama.

Pada halaman lain (77 dan 79), buku teks justru mengadopsi instrument hukum internasional seperti UDHR dan ICERD dalam menjelaskan konsep dan terma antidiskriminiasi bagi warga negara Indonesia dan definisi-definisi hak asasi manusia Indonesia. Celah ini menunjukkan kontradiksi. Jika hierarki antara superior dan inferior dalam wacana HAM ini diinversi atau dimaknai kembali secara lebih kritis, maka yang oposisi biner tersebut justru tidak saling berlawanan. Sebaliknya, wacana HAM Indonesia justru dapat tegak karena berhasil menyerap dan bernegosiasi dengan makna-makna HAM yinternasional. HAM Pancasila tidak benar-benar selesai dari jejak konstitusional global. Dengan kata lain, batas yang ditarik antara “Kita” sebagai warga Pancasila dan “Mereka” terbukti cair dan dialektis.

***Oposisi 7: Radikalisme Revolusioner vs. Radikalisme Beragama (Hal. 61)***

Berdasarkan pada buku ajar PkN Kelas XII yang mengulas bab tantangan ideologi global dan radikalisme, terdapat dua wacana yang menunjukkan oposisi biner tajam antara radikalisme revolusioner atau sekuler vs. radikalisme beragama atau teokratis. Berikut daftar representasi dari kedua wacana tersebut:

*Table 3. Polarisasi dua bentuk radikalisme dalam buku teks PkN Kelas XII*

Radikalisme Revolusioner	Radikalisme Beragama
Mengubah total struktur sosial/negara	Mengubah dasar negara menjadi hukum agama
Berbasis ideologi sekuler atau kelas	Berbasis khilafah dan sentiment keagamaan
Anti-kemapanan atau borjuasi	Anti-pluralisme
Sifat gerakan: pemberontakan politik-massa	Sifat gerakan: doktrin keagamaan dan ketuhanan yang kaku dan ekstrem
Menolak peran agama dalam ruang publik	Memutlakkan interpretasi agama yang cenderung tunggal

Derrida mengatakan bahwa dalam sebuah struktur, teks pasti membutuhkan jangkar atau *anchor* kepastian (Derrida, 1978). Jangkar tersebut ia sebut sebagai *the centre*. Namun, konsep Tengah ini tidak pernah totalitas. *The centre is not the centre*. Penyebabnya adalah jangkar ini punya karakteristik hadir di dalam sekaligus di luar struktur.

...the centre is, paradoxically, within the structure and outside it. The centre is at the centre of the totality, and yet, since the centre does not belong to the totality (is not part of it), the totality has its centre elsewhere. (Derrida, 1978, p. 279)

Pada teks oposisi 7 ini, Pancasila diposisikan sebagai teks jangkar. Alasannya karena Pancasila dihadirkan secara selesai, stabil, dan moderat. Tugas teks jangkar ini untuk menyeimbangkan kehidupan bernegara secara kohesif. Selain itu, Pancasila juga digunakan sebagai pembatas ruang gerak agar tidak menyentuh ranah-ranah ekstremis.

Untuk mempertegas posisi dan peran Pancasila sebagai jangkar, buku ajar PkN memanfaatkan dua radikalisme sebagai *ancaman luar*. Radikalisme beragama diposisikan sebagai kontaminasi yang mengancam sila ke-3 karena karakteristiknya yang eksklusif. Sedangkan radikalisme revolusioner diposisikan sebagai pengancam sila pertama karena sekularitasnya. Dengan demikian teks memberi klaim bahwa Pancasila adalah identitas murni dan otonom dari kedua jenis radikalisme tersebut.

Akan tetapi, bila kita menggunakan apa yang Derrida tawarkan tentang *The centre is not the centre*, maka muncul paradoks-paradoks logis. Pancasila sebenarnya bergantung pada apa yang ditolaknya. Ia dapat terdefinisi sebagai *the pure* karena kehadiran representasi-representasi radikalisme di sekitarnya. Maknanya sebagai *sang moderat* lahir karena kedua kutub ekstrem makna saling tarik-menarik. Tanpa medan pertarungan makna ini, Pancasila tak akan bisa terdefinisi.

Teks juga *berpura-pura* mengatakan bahwa radikalisme adalah produk asing. Padahal materi pembentuk Pancasila secara historis diambil dari dialektika spektrum tersebut. Sila pertama mengakomodasi nilai-nilai religius dan spiritualitas dalam radikalisme beragama. Sila kelima mengakomodari keadilan sosial atau perombakan struktur dalam radikalisme revolusioner. Dengan demikian, Pancasila sebagai jangkar makna sebenarnya menggunakan apa disebut sebagai ilusi logika. Pancasila tidak pernah berdiri secara murni karena stabilitasnya terus-menerus dipertahankan lewat berbagai macam pertarungan makna *radikalisme*.

### **Membaca dan Memaknai Kembali sebagai Celah untuk Ruang Alternatif**

Derrida menyatakan bahwa teks kerap kali memosisikan diri di tengah untuk mempertahankan netralitas dan keseimbangannya. Tetapi, bila ditelusuri jejaknya secara lebih dalam maka sebenarnya teks sedang bermain dalam ruang logika oposisi biner. Tidak pernah ada wacana yang benar-benar absolut di dalam teks, termasuk di dalam buku ajar PkN yang menjadi objek observasi dalam penelitian ini. Penelitian ini hadir sebagai sebuah langkah untuk membaca dan memaknai kembali buku ajar. Cara alternative ini memberikan posisi sebagai audien sebagai subjek aktif yang tidak memperlakukan buku ajar sebagai satu-satunya cara untuk memaknai toleransi. Sebaliknya, buku teks dibaca sebagai sebuah konstruksi wacana yang diproduksi oleh otoritas bahasa pada ruang dan waktu tertentu dengan berbagai kepentingan ekonomi politiknya.

Buku ajar kerap kali dibangun di atas struktur biner untuk menegaskan baik/benar vs. buruk/salah. Namun polarisasi tersebut seringkali politis dan diwarnai oleh paradoks-paradoks yang tampak logis. Polarisasi tersebut perlu dijeda untuk dimaknai kembali dengan pertanyaan *apakah kutub yang dianggap buruk benar-benar terpisah secara total, atau jangan-jangan terdapat makna-makna*

*subversive yang diabsenkan oleh teks?* Berjarak seperti ini akan memudahkan kita untuk melihat objektivitas makna dan wacana.

Derrida mengatakan bahwa teks selalu memiliki *the center* untuk menghentikan kepastian makna. Audien perlu memperhatikan momen di mana teks mengambil *the centre* atau sang pusat. Umumnya *the centre* ini memiliki ciri-ciri stabil, selesai, dan kebal dari pertarungan wacana di sekitarnya. Audien perlu menyadari bahwa *the centre is not the centre*. Makna tidak pernah stabil atau benar-benar murni dari paparan wacana di sekitarnya. Ia selalu berpihak.

Derrida menyarankan audien untuk menemukan momen aporia atau keretakan logika antar kata, kalimat, paragraph, antar-halaman, maupun antar-bab. Aporia ini adalah cara teks mengontradiksi logikanya sendiri. Atau momen di mana teks *merasa bersalah* pada dirinya sendiri karena terlalu kaku merepresentasikan wacana atau ideologi tertentu. Celah ini merupakan format negosiasi yang dapat memberi kita cara untuk melakukan *critical thinking*.

Menelusuri penundaan makna. Paham post-strukturalisme selalu memegang prinsip bahwa makna tidak pernah selesai. Ia selalu dapat ditanggguhkan dan digeser. Makna “toleransi” di masa Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, hingga era digital tahun 2026 ini selalu berubah bergantung pada siapa yang memegang otoritas bahasa. Membaca secara alternative berarti melihat bahwa konsep-konsep di dalam buku ajar PkN sebagai ruang yang terus-menerus dapat diperdebatkan.

Di samping itu, gagasan Derrida tentang dekonstruksi makna dan bahasa dapat memberi audien celah untuk kembali memaknai apa yang diabsenkan oleh teks. Caranya membacanya adalah dengan mempertanyakan siapa atau apa yang tidak ditulis atau sengaja disembunyikan oleh teks. Ketika teks bicara tentang *kepentingan bersama*, carilah suara-suara kelompok yang dimarginalkan misalnya masyarakat adat, kelompok minoritas, atau kelas pekerja.

## KESIMPULAN

Melalui serangkaian analisis dekonstruksi Derrida terhadap konsep toleransi, intoleransi, dan radikalisme dalam penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa teks narasi kebangsaan dan kewarganegaraan diproduksi secara logosentris. Teks disusun dengan oposisi biner di mana nilai-nilai domestic dihadirkan secara superior dan pengaruh eksternal dianggap sebagai kontaminasi atau pihak inferior.

Penelitian ini masih dapat dikembangkan ke ranah yang lebih strategis, inovatif, dan praktis. Secara konseptual riset analisis kritis terhadap kurikulum dan buku ajar dapat dikembangkan untuk membongkar hegemoni bahasa pada isu-isu kontemporer lainnya. Seperti misalnya analisis eksklusi pada profil pelajar Pancasila yang fokusnya adalah menganalisis lokalitas apa saja yang sengaja ditepikan demi membangun standard karakter nasional yang seragam.

Pada ranah praktis-pedagogis, membaca alternative dapat dilakukan di dalam kelas melalui format PTK berbasis literasi kritis. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa saat membaca narasi-narasi ideologi di buku-buku paket, sehingga mereka tidak sekadar menghafal oposisi biner belaka, namun meninjau lebih jauh tentang bagaimana oposisi biner dibangun.

Dalam ranah kebijakan, analisis kebijakan dalam diteliti tentang bagaimana kurikulum di tingkat pusat melakukan negosiasi linguistic saat memasukkan agenda-agenda global seperti *sustainable development goals*, Hak Asasi Manusia, bahkan konsep-konsep kebebasan berpikir.[]

## DAFTAR RUJUKAN

- Amir, I., Nursalam, Wardihan, Rahim, A., & Nurhikmah. (2026). Buku Teks Sebagai Instrumen Diskursif: Analisis Wacana Kritis Terhadap Wacana Moderasi Beragama dalam Buku Bahasa Indonesia SMA Kelas X. *ALFABETA: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya*, 9(1), 25–38.
- Amrullah, Z., & Rida, M. F. (2021). Pembacaan buku teks Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas X SMA dalam perspektif toleransi dan intoleransi beragama. *AJMIE: Al-Hikam Journal of Multidisciplinary Islamic Education*, 2(2), 21–33.
- Cisney, V. W. (2019). Implications and Conslusions. In *Deleuze and Derrida: Difference and the Power of the Negative* (pp. 249–282). Edinburgh University Press. <https://www.cambridge.org/core/books/abs/deleuze-and-derrida/conclusions/657698AE34CAB7EDDEB21B251B63CBBF>
- Derrida, J. (1976). *Of Grammatology*. John Hopkins University Press.
- Derrida, J. (1978). *Writing and Difference*. University of Chicago Press.
- Derrida, J. (1981). *Position*. University of Chicago Press.
- Derrida, J. (1982). Jacques Derrida Différance. In *Margins of Philosphy* (pp. 3–27). University of Chicago Press. <https://web.stanford.edu/class/history34q/readings/Derrida/Differance.html>
- Derrida, J. (1983). *Letter to a Japanese Friend*. [https://grattoncourses.wordpress.com/wp-content/uploads/2012/11/letter\\_to\\_a\\_japanese.pdf](https://grattoncourses.wordpress.com/wp-content/uploads/2012/11/letter_to_a_japanese.pdf)
- Fusnika, Hartini, A., & Cali, H. M. (2023). ANALISIS NILAI TOLERANSI PADA MATA PELAJARAN PPKN SEBAGAI UPAYA MENCEGAH TINDAKAN INTOLERANSI DI KELAS IX C SMPN 1 SEMITAU TAHUN PELAJARAN 2022/2023. *Jurnal PEKAN*, 8(2), 105–111.
- Gunkel, D. J. (2020). What the National Review Gets Wrong About Deconstruction. *The MIT Press Reader*. <https://thereader.mitpress.mit.edu/what-the-national-review-gets-wrong-about-deconstruction/>
- Harsaid, Y., Anwar, M., & Rohman, S. (2024). *Pedagogi Kritis dalam Buku Teks Bahasa Indonesia Fase F: Kajian Analisis Wacana Kritis*. Perpustakaan Sekolah Pascasarjana UNJ.
- INFID. (2025). *Fakta Mengejutkan: 42,5% Orang Muda Intoleran, INFID Tegaskan Peran Mereka sebagai Agen Perubahan dalam HAM*. [https://www.merdeka.com/peristiwa/fakta-mengejutkan-425-orang-muda-intoleran-infid-tegaskan-peran-mereka-sebagai-agen-perubahan-dalam-ham-474178-mvk.html#google\\_vignette](https://www.merdeka.com/peristiwa/fakta-mengejutkan-425-orang-muda-intoleran-infid-tegaskan-peran-mereka-sebagai-agen-perubahan-dalam-ham-474178-mvk.html#google_vignette)
- Kemenag. (2019a). LHS dan Moderasi Beragama. *Kemenag.Go.Id*.
- Kemenag. (2024a). *Kerukunan Beragama di Indonesia Meningkat, Indeks KUB 2024 Capai 76,47, Kategori Sangat Tinggi*. <https://bimashindu.kemenag.go.id/berita-pusat/kerukunan-beragama-di-indonesia-meningkat-indeks-kub-2024-capai-76-47-kategori-sangat-tinggi-4VP9h>

- Kemenag. (2024b). Mahmud: Keberhasilan Moderasi Beragama Diukur melalui 4 Indikator Utama. *Gorontalo.Kemenag.Go.Id*.
- Kemenag. (2025). *Hasil Survei Kemenag 2025: Tingkat Toleransi dan Kesalehan Umat di Indonesia Masuk Kategori Sangat Tinggi*. <https://www.ayosemarang.com/umum/7716458876/hasil-survei-kemenag-2025-tingkat-toleransi-dan-kesalehan-umat-di-indonesia-masuk-kategori-sangat-tinggi?page=2>
- Kemenag, L. (2019b). *Moderasi Beragama*.
- Kompas. (2022). *Survei Litbang “Kompas”: Sikap Toleransi Masyarakat Tinggi, tetapi Dibayangi Ancaman Konflik Agama dan Politik*. [https://nasional.kompas.com/read/2022/11/14/11365351/survei-litbang-kompas-sikap-toleransi-masyarakat-tinggi-tetapi-dibayangi?page=all#google\\_vignette](https://nasional.kompas.com/read/2022/11/14/11365351/survei-litbang-kompas-sikap-toleransi-masyarakat-tinggi-tetapi-dibayangi?page=all#google_vignette)
- Mendie, J. G., & Udofia, S. N. (2020). A Philosophical Analysis of Jacques Derrida’s Contributions to Language and Meaning. *PINISI: Discretion Review*, 4(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.26858/pdr.v4i1.14528>
- Muhammadiyah. (2022). Apa saja indikator moderasi beragama menurut Kemenag RI? *Muhammadiyah.or.Id*.
- Ngulya, K., & Sukardi. (2024). Analisis Pembelajaran Toleransi dalam Buku Bahasa Indonesia Kurikulum Merdeka Kelas II Sekolah Dasar (Analysis of Tolerance Learning in the Indonesian Textbook of the Independent Curriculum for Grade II Elementary School). *Primary: Jurnal Keilmuan Dan Kependidikan Dasar*, 16(1), 63–78.
- Rasyid, M. M. (2025). *Indonesia’s terrorist networks are adapting, not disappearing*. <https://eastasiaforum.org/2025/04/18/indonesias-terrorist-networks-are-adapting-not-disappearing/>
- Rohayani, I., Gazali, H., & Setiawan, D. A. (2023). *Pendidikan Pancasila untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XII*. Pusat Perbukuan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Siregar, M. (2019). Kritik terhadap Teori Dekonstruksi Derrida. *Journal of Urban Sociology*, 2(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.30742/jus.v2i1.611>
- Sopian, T., Irwansyah, I., Mario, M., & Arisnawati, A. (2021). Terrorism Habitus Reproduction in Indonesia (Study of Pierre Bordieu’s Thought in Potraying Terror Behavior in Indonesia). *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, 10(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.22202/mamangan.v10i2.4978>
- Widyawati, D. (2025). *ISU-ISU SEJARAH KONTROVERSI DALAM BUKU TEKS PELAJARAN IPS SMA* [Universitas PGRI Palembang]. <http://eprints.univpgri-palembang.ac.id/2527/>
- Yasi, S. M. W., Warty, W., & Sunardi, S. (2018). Tolerance Representation in the Historical Textbooks. *IJMMU: International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 5(6). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v5i6.939>
- Yuliana, A. P., Chairiyah, Nadziroh, & Pratomo, W. (2024). IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DALAM MENUMBUHKAN SIKAP TOLERANSI DI KELAS IV SISWA SDN KEPUTRAN 1 YOGYAKARTA. *Jurnal PEKAN*, 9(1), 77–87.